

**PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAHDALAM PENANGANAN BECANA KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DI SEKITAR TAMAN NASIONAL TESSO NILO**

**KNOWLEDGE SOCIETY AGAINST POLICY GOVERNMENT IN HANDLING
DISASTER FOREST FIRE DISASTER AND LAND AROUND
TESSO NILO NATIONAL PARK**

Kristian Nurdianto¹, M. Mardhiansyah, S.Hut., M.Sc², Yossi Oktorini, ST., M.Sc²
(Departemen of Forestry, Faculty of Agriculture, University of Riau)
Adress Bina Widya Km 12,5 Panam, Pekanbaru, Riau
Email : Kristian_nurdianto@yahoo.com

ABSTRACT

National Park is a nature conservation area, in management there are many threats that can damage or reduce the national park area. One such threat is forest fires and land. Forest fires in Tesso Nilo National Parks (TNTN) generally caused by land clearing. Mechanisms for resolving problems of forest and land fires that occurred in TNTN at comprehensive, one application of the policy. Given the function of the National Park as a life support system protection, preservation of biological diversity, sustainable use of natural resources and ecosystems. The purpose of this study was to determine people's knowledge of government policy in the management of land and forest fire disasters. Methods of data collection by way of documentation, interviews and questionnaires. Sampling using purposive sampling method and quoted sampling Number of samples this study of 38 people with the details, two (2) persons Hall TNTN, 4 (four) NGO, 2 (two) Forest Service Pelalawan, and 30 community living TNTN around. The data obtained, processed using techniques percentage and compiled into the form of tables, so it can be deduced. The results showed Lubuk Kembang Bunga Village, Air Hitam Village and Bagan Limau Village generally do not know about the existence of government policy in the handling of forest fires and land applied in TNTN.

Keywords : Policy, forest fires, National Park

PENDAHULUAN

Taman nasional merupakan suatu kawasan hutan konservasi ataupun kawasan pelestarian alam (KPA), dalam pengelolaannya terdapat berbagai ancaman yang dapat merusak ataupun mengurangi kawasan taman nasional. Salah satu ancaman tersebut adalah kebakaran hutan dan lahan. Penyebab kebakaran hutan dan

lahan didefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat alami maupun perbuatan manusia yang menyebabkan terjadinya proses penyalan serta pembakaran bahan bakar hutan dan lahan. Faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu

¹ Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

² Staf Pengajar Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau
Jom Faperta Vol.3 No.1 Februari 2016

faktor alam dan faktor manusia (Syaufina, 2008).

Kebakaran hutan dan lahan juga ditunjang oleh beberapa faktor antara lain, perilaku masyarakat yang berubah dan kebijakan pemerintah. Perilaku berubah sangat berhubungan dengan tidak berfungsinya aturan yang ada, yaitu menguntungkan pengusaha tetapi merugikan masyarakat, sehingga sering menimbulkan masalah atau konflik (Saharjo, 2008).

Secara teori dan aplikasi kebakaran hutan terjadi akibat terpenuhinya interaksi antara bahan bakar, oksigen dan sumber panas. Tanpa ada interaksi dari ketiga komponen tersebut kebakaran hutan dan lahan tidak akan mungkin terjadi. Interaksi ketiga komponen bisa ditarik kesimpulan bahwa kebakaran hutan sangat mustahil terjadi dengan sendiri. Kebakaran hutan semula dianggap terjadi secara alami, tetapi kemungkinan manusia mempunyai peran dalam memulai suatu kebakaran hutan guna untuk memudahkan pembukaan lahan dan kepentingan lainnya.

Kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan kerugian maupun dampak negatif antara lain hilangnya tegakan kayu hutan, hasil hutan non kayu, tumbuhan maupun bibit yang bermanfaat bagi manusia seperti tanaman obat, tempat rekreasi, fungsi penyediaan air bagi pertanian, flora dan fauna yang memperkaya pengetahuan manusia (Sastradiharja, 2010).

Taman Nasional Tesso Nillo (TNTN) merupakan kawasan Taman Nasional yang sangat terpengaruh oleh adanya aktifitas masyarakat sekitar kawasan, dimana kebanyakan masyarakat sekitar kawasan taman nasional tersebut beraktifitas sebagai pekebun. Data temuan titik api yang dihimpun Balai TNTN selama 5 tahun terakhir (2009-2013) yang menunjukkan bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan yang rawan terjadinya

kebakaran hutan dan lahan. Pada tahun 2009 ditemukan jumlah hotspot sebanyak 298 titik, tahun 2010 ditemukan jumlah hotspot sebanyak 109 titik, tahun 2011 ditemukan jumlah hotspot sebanyak 148 titik, tahun 2012 ditemukan jumlah hotspot sebanyak 355 titik, dan tahun 2013 ditemukan jumlah hotspot sebanyak 644 titik (Balai TNTN, 2014). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di sekitar TNTN.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilakukan di TNTN Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, dimana di sekitar taman nasional tersebut terdapat tiga desa yang berdekatan yaitu Desa Lubuk Kembang Bunga, Desa Air Hitam dan Desa Bagan Limau. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, mulai terhitung dari Bulan Oktober 2014 sampai Bulan November 2014. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data temuan titik api di TNTN tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di TNTN dan kuesioner. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, kamera dan lain-lain.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei. Metode survei merupakan cara pengumpulan data dimana peneliti ataupun pengumpul data mengajukan pertanyaan atau pernyataan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis (Sanusi, 2011). penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, wawancara, kuesioner dan Observasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis persentase.

Teknik analisis persentase adalah data yang diperoleh dari responden di lapangan disusun dalam tabel-tabel, selanjutnya dilakukan penilaian analisis persentase (%) dan disimpulkan berdasarkan kecenderungan pada tiap-tiap jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner (Andriani, 2012). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan *quoted sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, sedangkan *quoted sampling* adalah metode memilih sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam jumlah atau kuota yang diinginkan (Sugiyono dalam Susilana dan Johan, 2012). Total sampel penelitian yaitu berjumlah 38 orang, dengan rincian Balai TNTN (2 orang), Dinas Kehutanan (2 orang), LSM (4 orang) dan masyarakat (30 orang).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Luasan kawasan hutan yang terbakar di Taman Nasional Tesso Nilo Tahun 2013

Data mengenai luasan kawasan hutan yang terbakar di TNTN, hanya diperoleh pada tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luasan kawasan hutan yang terbakar di Taman Nasional Tesso Nilo tahun 2013.

No	Bulan	Luas yang terbakar (ha)
1	Januari	38,0
2	Februari	0,0
3	Maret	65,0
4	April	1,5
5	Mei	0,0
6	Juni	106,0
7	Juli	67,5
8	Agustus	54,0
9	September	0,0
10	Oktober	0,0
11	November	0,0
12	Desember	0,0
Jumlah		332,0

Sumber : Balai Taman Nasional Tesso Nilo 2014

Kejadian kebakaran hutan di TNTN secara umum disebabkan oleh adanya pembukaan lahan yang akan dialih fungsikan sebagai perkebunan kelapa sawit. Data tahun 2013, menunjukkan kejadian kebakaran hutan dengan luasan yang paling luas dan berturut-turut dibandingkan dengan bulan lainnya, yaitu terjadi pada Bulan Juni - Agustus. Hal ini sesuai dengan pernyataan Suhandri (2008) yang menyatakan hampir seluruh kebakaran terjadi pada musim kering utama/musim kemarau. Umumnya kondisi ini di Riau berlangsung sekitar 3 bulan dari Juni hingga Agustus.

B. Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Diterapkan Di Taman Nasional Tesso Nilo

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu ancaman terhadap keutuhan kawasan dan berdampak pada kerusakan ekologi yang lebih besar. Sebagai konsep rehabilitasi, konservasi, memperhatikan perkembangan kondisi TNTN, dan salah satu upaya pemerintah mencegah ataupun mengurangi berbagai ancaman khususnya kebakaran hutan dan lahan adalah penerapan kebijakan yang terkait masalah penanganan kebakaran hutan dan lahan. Beberapa kebijakan pemerintah yang diterapkan di TNTN dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan yaitu diantaranya :

1. Keputusan Menteri Kehutanan No. 7501/Kpts-II/2002 tanggal 7 Agustus 2002 menetapkan 5 kebijakan prioritas bidang kehutanan dalam program pembangunan nasional yang harus segera ditangani dan diselesaikan. Lima kebijakan prioritas tersebut adalah :
 - a. Pemberantasan penebangan liar,
 - b. Penanggulangan/pengendalian kebakaran hutan,
 - c. Restrukturisasi sektor kehutanan,

- d. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan,
 - e. Desentralisasi sektor kehutanan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 pasal 50 d Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

C. Perlindungan kawasan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan

Tanggung jawab menjaga hutan ataupun TNTN tidak hanya tanggung jawab pemerintah semata, namun juga dibutuhkan campur tangan masyarakat sekitar kawasan. Masyarakat dan pemerintah harus saling berkolaborasi dalam mempertahankan kawasan hutan. Masyarakat itu sendiri memiliki peran lebih dekat dengan kawasan taman nasional. Jawaban responden mengenai faktor penyebab terjadinya kebakaran dan solusi yang ingin masyarakat sampaikan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perlindungan kawasan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan

Alternatif Jawaban	Responden					
	Desa 1		Desa 2		Desa 3	
	F	P (%)	F	P (%)	F	P (%)
1. Faktor penyebab terjadinya kebakaran						
Suhu	0	0	0	0	0	0
Pembukaan Lahan	10	100	9	90	10	100
Banyaknya bahan bakar	0	0	1	10	0	0
2. Solusi yang ingin masyarakat sampaikan tentang penanganan kebakaran hutan dan lahan kepada pihak TNTN						
Ada Solusi	1	10	1	10	0	0
Tidak ada Solusi	9	90	9	90	10	100

Keterangan :

F = Frekuensi alternatif jawaban

P = Besar persentase alternatif jawaban

Tabel 4 menunjukkan hasil wawancara dengan responden mengenai faktor penyebab terjadinya kebakaran, masyarakat pada desa 1 (Desa Lubuk Kembang Bunga) dan desa 3 (Desa Bagan Limau) menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya kebakaran adalah pembukaan

lahan yaitu sebanyak 100%. Pada desa 2 (Desa Air Hitam) yang menyatakan faktor penyebab terjadinya kebakaran adalah pembukaan lahan yaitu sebanyak 90% dan hanya 10% yang menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya kebakaran adalah banyaknya bahan bakar, banyaknya bahan bakar pada dasarnya juga menunjang terjadinya kebakaran hutan dan lahan, namun pembukaan lahan sebagai pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama ini sudah menjadi rahasia umum yang diketahui oleh masyarakat. Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Sejumlah besar kebakaran hutan dan lahan juga dilakukan dengan sengaja. Untuk unsur kesengajaan, manusia sengaja melakukan pembakaran hutan untuk membuka dan membersihkan lahan untuk pertanian dan perkebunan. Pelaku pembakaran hutan ini disamping masyarakat juga dilakukan oleh pengusaha-pengusaha perkebunan kelapa sawit seperti yang terjadi di hutan Sumatra (Sastradiharja, 2010).

Tabel 4 menunjukkan bahwa desa 1 dan desa 2 (Desa Lubuk Kembang Bunga dan Desa Air Hitam) terdapat 90% responden menjawab tidak adanya solusi atau strategi yang ingin masyarakat sampaikan tentang penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan kepada pihak TNTN, sementara responden yang menjawab adanya solusi hanya 10%, solusi yang ingin disampaikan dan dinyatakan oleh responden adalah mengenai kesadaran tanggap api, mempertahankan kawasan hutan yang ada, ataupun yang dimaksud adalah membentuk kolaborasi pemerintah dan masyarakat secara baik dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Responden pada desa 3 (Desa Bagan Limau) mayoritas menjawab tidak adanya solusi atau strategi yang ingin masyarakat sampaikan tentang penanganan kebakaran hutan dan lahan kepada pihak TNTN adalah

sebanyak 100%. Adinugroho dkk (2005) menyatakan, melihat berbagai penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan, maka diperoleh solusi dengan mengupayakan tindakan pencegahan secara dini.

D. Sosialisasi kebijakan perlindungan kawasan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan

Pemerintah adalah pemegang kebijakan, kebijakan merupakan salah satu *output* atau hasil dari proses penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah harus disosialisasikan. Melalui proses sosialisasi para anggota masyarakat belajar mengetahui dan memahami hal yang diharuskan, diperbolehkan, dianjurkan dan tidak boleh dilakukan (Hamdi, 2014). Adanya sosialisasi mengenai kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan masyarakat diharapkan dapat menerapkannya serta dapat mengurangi ataupun mencegah ancaman dari pengelolaan TNTN khususnya masalah kebakaran hutan dan lahan. Ada atau tidaknya sosialisasi kebijakan kebakaran hutan dan lahan dan jawaban masyarakat yang mengetahui kebijakan kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Sosialisasi kebijakan perlindungan kawasan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan

Alternatif Jawaban	Responden					
	Desa 1		Desa 2		Desa 3	
	F	P (%)	F	P (%)	F	P (%)
1. Sosialisasi kebijakan kebakaran hutan dan lahan						
Ada Sosialisasi	4	40	3	30	0	0
Tidak ada Sosialisasi	6	60	7	70	10	100
2. Mengetahui adanya kebijakan/peraturan undang-undang mengenai kebakaran hutan dan lahan						
Mengetahui	3	30	3	30	0	0
Tidak mengetahui	7	70	7	70	10	100

Keterangan :

F = Frekuensi alternatif jawaban

P = Besar persentase alternatif jawaban

Tabel 5 menunjukkan bahwa bahwa desa 1 (Desa Lubuk Kembang Bunga) responden yang menyatakan mendapatkan sosialisasi mengenai kebijakan kebakaran hutan dan lahan yaitu 40% dan responden yang menyatakan tidak adanya sosialisasi adalah sebanyak 60%. Pada desa 2 (Desa Air Hitam) responden yang menyatakan mendapatkan sosialisasi mengenai kebijakan kebakaran hutan dan lahan lebih sedikit dari desa yang sebelumnya yaitu hanya 30% dan responden yang menyatakan tidak adanya sosialisasi adalah sebanyak 70%. Sementara pada desa 3 (Desa Bagan Limau) menunjukkan bahwa 100% responden menjawab tidak adanya sosialisasi mengenai kebijakan kebakaran hutan, hal ini bisa dikatakan dengan alasan yang sebelumnya bahwasannya desa 3 (Desa Bagan Limau) tidak berdekatan dengan kantor seksi pengelolaan taman nasional wilayah 1, informasi mengenai sosialisasi mengenai kebijakan kebakaran hutan tidak tersampaikan. Kebijakan negara dalam bentuk undang-undang yang diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan, namun dari hasil Tabel 5 menunjukkan sosialisasi tidak didapatkan secara merata oleh masyarakat.

Tabel 5 menunjukkan pada desa 1 dan desa 2 (Desa Lubuk Kembang Bunga dan Desa Air Hitam) responden yang mengetahui adanya kebijakan atau peraturan undang-undang mengenai kebakaran hutan dan lahan yaitu 30% dan yang tidak mengetahui adalah sebanyak 70%. Pada desa 3 (Desa Bagan Limau) mayoritas responden sebanyak 100% tidak mengetahui adanya kebijakan atau peraturan undang-undang mengenai kebakaran hutan dan lahan. Hal ini sejalan dengan sosialisasi mengenai kebijakan kebakaran hutan dan lahan yang tidak merata dan bisa dikatakan kurangnya pendekatan sosial ataupun komunikasi sosial dari pihak taman TNTN

terhadap masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan. Kebijakan atau peraturan undang-undang mengenai kebakaran hutan dan lahan seyogyanya diketahui oleh masyarakat sekitar TNTN melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Masalah kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dipandang secara parsial dan bersifat *temporary* atau jangka pendek. Kebijakan tersebut harus bersifat jangka panjang dan menyeluruh sehingga kerusakan hutan di Indonesia bisa dihentikan. Kebijakan-kebijakan itu sendiri juga harus mencakup beberapa hal yang berhubungan dengan kebakaran hutan seperti aspek pencegahan, pemantauan dan penanggulangan (Yurizal, 2003).

E. Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan di Taman Nasional Tesso Nilo

Berdasarkan analisis hasil wawancara terhadap informan kunci, didapat beberapa faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan di TNTN :

- Pembukaan Lahan
- Kurangnya Penguatan Kapasitas MPA (Masyarakat Peduli Api)
- Lemahnya Penegakan Hukum
- Lemahnya Koordinasi Para Pihak
- Minimnya Sumber Daya Manusia
- Minimnya Sarana Dan Prasarana
- Minimnya Anggaran Dalam Penanganan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa masyarakat Desa Lubuk Kembang Bunga (70%), Desa Air Hitam (70%) dan Desa Bagan Limau (100%) secara umum belum mengetahui tentang adanya kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dibuktikan dengan data yang ada, masyarakat hanya mengetahui keberadaan TNTN namun tidak mengetahui tujuan ataupun bentuk pengelolaannya, yang

didukung dengan kurangnya komunikasi dari pihak TNTN kepada masyarakat, serta masyarakat yang kurang dilibatkan dalam hal partisipasi. Masyarakat kurang merasakan adanya manfaat dari kehadiran TNTN, dikarenakan tidak adanya kontribusi yang didapat. Masyarakat cenderung tertutup untuk mengutarakan suatu solusi mengenai penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di TNTN dan kurangnya sosialisasi dari pihak TNTN mengenai kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Lubuk Kembang Bunga, Desa Air Hitam dan Desa Bagan Limau secara umum belum mengetahui tentang adanya kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan yang diterapkan di Taman Nasional Tesso Nilo (Desa Lubuk Kembang Bunga 70%, Desa Air Hitam 70% dan Desa Bagan Limau 100%).

Saran

Agar kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo dapat berjalan dengan baik, perlu ditingkatkan adanya komunikasi sosial secara intensif dan adanya kegiatan sosialisasi secara rutin ataupun berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Adinugroho, Suryadiputra, Saharjo dan Siboro. 2005. **Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut**. Wetlands International. Bogor.

Andriani F. 2012. **Kendala asimilasi Etnis Tionghua dan Etnis Melayu di Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.** Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.

Balai Taman Nasional Tesso Nilo (BTNTN). 2014. **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LANKIP).** Pangkalan Kerinci. Riau.

Hamdi. 2014. **Kebijakan Publik : Proses, Analisis, dan Partisipasi.** Ghalia indonesia. Bogor.

Saharjo, B.H. 2008. **Pedoman analisis potensi dan risiko bahaya kebakaran hutan dan lahan.** Laporan BNPB dan UNDP.

Sanusi. 2011. **Metode Penelitian Bisnis.** Salemba Empat. Jakarta Selatan.

Sastradiharja. 2010. **Tanggap Bencana Kebakaran.** Penerbit Angkasa. Bandung.

Suhandri. 2008. **Suara Tesso Nillo.** Bulletin WWF. Pekanbaru.

Susilana. R dan Johan. R. 2012. **Penelitian Pendidikan.** Jakarta.

Syaufina. 2008. **Kebakaran Hutan dan Lahan Di Indonesia.** Bayumedia Publishing. Malang.

Yurizal. 2003. **Strategi penyelamatan hutan dari kebakaran.** jikalauhari. Riau